

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan

1. Sejarah Singkat Bapenda Kabupaten Mojokerto

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA), Berdasarkan Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang – undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Mojokerto (BAPENDA) yang dulunya bernama Dinas Pendapatan Daerah Mojokerto (DISPENDA)

2. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Mojokerto

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (BAPENDA) provinsi jawa timur. Bapenda kabupaten mojokerto bertanggung jawab atas urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Selain itu, Bapenda memiliki tugas dan fungsi lainnya. Tugas Bapenda yang utama adalah :

dan juga sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

Untuk fungsi Bapenda yaitu :

- Membuat kebijakan bidang pendapatan daerah
- melaporkan pekerjaan penagihan pajak daerah
- Retribusi dan penerimaan daerah lainnya
- Melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah
- Evaluasi pendapatan daerah ,dll.

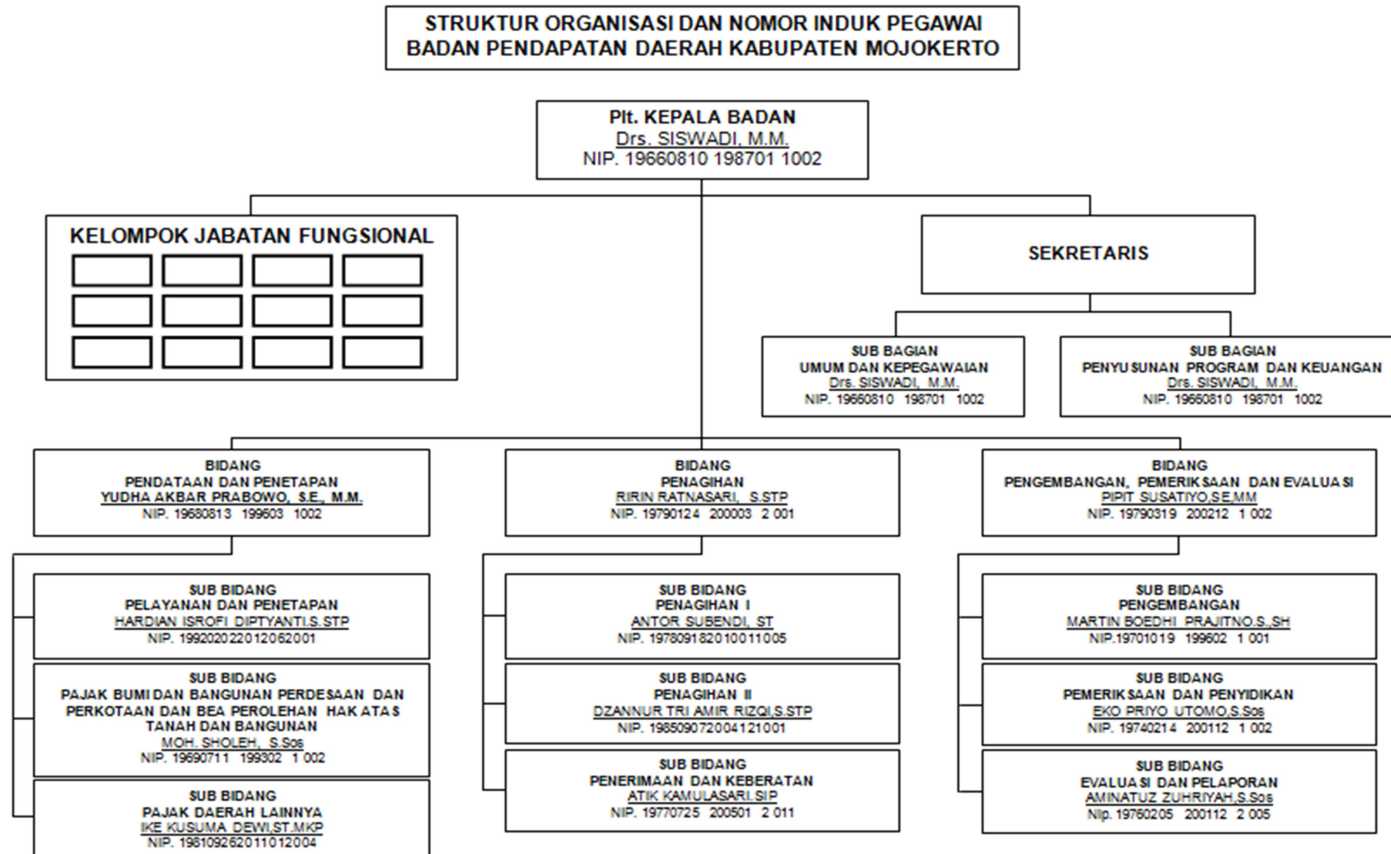
Ada beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Bapenda adalah :

- Mengawasi penerimaan pajak rumah bangunan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor .

3. Struktur Organisasi

Dibawah ini adalah Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



GAMBAR 4 STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA

4. Tugas dan Fungsi Masing – Masing Unit Kerja

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja dalam pelaksanaan operasionalnya adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Di BAPENDA Sekretariat bertugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas BAPENDA untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

B. Bidang Pendataan dan Penetapan

Dalam melaksanakan pekerjaannya Kepala Badan di bantu Bidang Pendataan dan Penetapan dalam menyelesaikan pekerjaannya, seperti pelayanan dan penetapan, PBB P2 dan BPHTB dan serta pajak daerah lainnya.

C. Bidang Penagihan

Dalam pekerjaan ini Kepala Badan di bantu Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugasnya, tugas tersebut adalah penagihan serta penerimaan dan keberatan,

Bidang Penagihan memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi penagihan serta penerimaan dan keberatan, Dalam melaksanakan tugasnya, adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyampaian SKPD /SPPT/DHKP
- 2) Memproses permohonan pengurangan angsuran pembayaran pajak daerah

- 3) Memproses permohonan pengurangan dan banding terhadap ketetapan pajak daerah.
- 4) Pelaksanaan proses penagihan pajak daerah
- 5) Menagih wajib pajak dengan surat paksa
- 6) Melakukan sosialisasi tentang pajak daerah
- 7) Melakukan penertiban pada pajak daerah
- 8) Mengelola piutang pajak daerah
- 9) Menagih piutang pajak daerah
- 10) Melaksanakan penerimaan dan pembukuan

D. Sub Bidang Penagihan I dan II

Sub bidang penagihan I dan II memiliki tugas :

- 1) Menyampaikan SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya di wilayah kabupaten Mojokerto.
- 2) Melakukan proses penagihan pajak daerah di wilayah kabupaten Mojokerto.
- 3) Melakukan penagihan dengan surat paksa kepada wajib pajak di wilayah kabupaten Mojokerto.
- 4) Memberikan sosialisasi perpajakan daerah di wilayah kabupaten Mojokerto.
- 5) Melakukan penagihan piutang pajak kepada wajib pajak di wilayah kabupaten Mojokerto.
- 6) Melakukan proses penertiban pajak daerah di wilayah kabupaten Mojokerto .

7) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

8) dan Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan I dan II

E. Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan

Sub bidang penerimaan dan keberatan di BAPENDA mempunyai tugas :

- 1) Melakukan proses permohonan angsuran pembayaran pajak daerah.
- 2) Melakukan proses permohonan pengurangan, keberatan, dan banding ketetapan pajak daerah
- 3) Mengelola data piutang pajak daerah
- 4) Melakukan proses penerimaan dan pembukuan
- 5) Melakukan penyusunan bahan produk hukum
- 6) Mengevaluasi dan membuat laporan
- 7) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan

F. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan di bantu Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi tugasnya yaitu melaksanakan pengembangan, pemeriksaan, dan penyidikan serta evaluasi dan pelaporan

G. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Bidang ini memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam menyelesaikan sebagian tugas BAPENDA sesuai dengan keahlian, keterampilan, kemampuan dan kebutuhan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

“Prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dimulai dari wajib pajak yang mendaftarkan objek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Wajib Pajak) secara jelas, benar, dan lengkap dan dikembalikan ke tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP. Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditunjuk untuk melalui teknologi internet” (Ditjen Pajak, 2012).

Adapun kelengkapan persyaratan PBB adalah sebagai berikut :

1. KTP yang masih berlaku / E – KTP di Fotokopi.
2. Sertifikat/Surat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah di Fotokopi.
3. Bukti SPPT PBB tahun sebelumnya di Fotokopi.
4. Bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya
5. Mengisi blangko SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) PBB ditanda tangani dan di cap
6. Mengisi blangko permohonan
7. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000

2. Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mojokerto hampir sama dengan pembayaran pajak di kabupaten / kota lainnya, di Kabupaten Mojokerto pembayar pajak bisa melalui :

- Petugas pemungut PBB (Kelurahan)
- Bank, yaitu melalui Teller, M – Banking dan Drive Thru

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas perbankan berupa Mobile Banking adalah sebagai berikut :

1. Buka aplikasi Mobile Banking yang anda punya
2. Kemudian tekan masuk dan masukkan password
3. Pilih rekening kemudian klik pembayaran
4. Lalu pilih Pembayaran PBB kemudian input nomor pelanggan
5. Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Tahun kemudian klik Lanjut
6. Pastikan terlebih dahulu Nama, Tahun, Nominal dengan benar kemudian input PIN anda
7. Klik lanjut dan pembayaran sukses
8. Pembayaran PBB telah berhasil

3. Perbandingan pembayaran PBB melalui bank lebih baik

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas perbankan jauh lebih mudah daripada melalui yang lain, Wajib pajak akan merasakan langsung kelebihannya yaitu dalam pembayaran melalui bank wajib pajak akan dipermudah dengan fasilitasnya, seperti M – Banking Drive Thru atau dengan langsung membayar ke Teller dan manfaat lainnya adalah seperti pada saat membayar pajak Nomor Objek Pajak tersebut akan otomatis terdaftar undian dan akan mendapatkan hadiah. Bila wajib pajak membayar melalui E – Commerce maka wajib pajak harus menginstall terlebih dahulu aplikasinya, setelah menginstall wajib pajak harus mendaftar kemudian Top Up saldo untuk membayar tagihan pajak.

Lain halnya bila membayar melalui kelurahan atau petugas pemungut PBB, memang benar cara tersebut juga mudah tetapi ada risiko yang kemungkinan terjadi. Misalnya, bila petugas pemungut tersebut tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya maka akibatnya uang untuk membayar tagihan pajak tidak terbayarkan.